

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan orang di Thailand pada periode 2023–2025 menunjukkan persoalan yang semakin kompleks karena Thailand memiliki posisi sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang, sementara bentuk eksploitasi berkembang dari kerja paksa dan eksploitasi seksual menuju bentuk baru seperti *forced criminality* dalam jaringan *online scam compounds*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas pemerintah nasional, tetapi membutuhkan koordinasi, informasi, keahlian teknis, serta dukungan aktor internasional. Hal ini menjadi konteks yang menjelaskan mengapa keterlibatan IOM memiliki relevansi dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban di Thailand.

Berdasarkan analisis menggunakan konsep fungsi organisasi internasional dari Karns, Mingst, dan Stiles, penelitian ini menemukan bahwa IOM menjalankan berbagai fungsi organisasi internasional dalam mendukung perlindungan korban perdagangan orang di Thailand. Namun, fungsi-fungsi tersebut tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama. Fungsi yang paling dominan adalah fungsi operasional, yang diperkuat oleh fungsi informasional dan fungsi forum. Ketiga fungsi tersebut paling terlihat karena secara langsung menghubungkan kapasitas IOM dengan kebutuhan perlindungan korban di lapangan.

Fungsi operasional menjadi fungsi yang paling dominan karena IOM tidak berhenti pada pemberian rekomendasi atau penyebaran norma, tetapi terlibat

dalam penerapan mekanisme perlindungan korban. Dukungan terhadap implementasi *National Referral Mechanism* (NRM), peningkatan kapasitas aparat, identifikasi dan rujukan korban, pendampingan, pemulangan secara aman, serta reintegrasi menunjukkan adanya keterlibatan langsung IOM dalam menerjemahkan kebijakan perlindungan korban menjadi tindakan konkret. Dengan demikian, berdasarkan konsep Karns, Mingst, dan Stiles, aktivitas tersebut menunjukkan fungsi operasional karena IOM menjalankan bantuan teknis dan pelayanan melalui jaringan mitra nasional untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

Fungsi informasional menjadi fungsi pendukung yang penting karena informasi yang dihasilkan IOM tidak hanya berfungsi sebagai data statistik, tetapi digunakan untuk meningkatkan kualitas identifikasi dan asesmen korban. Informasi mengenai kondisi korban, bentuk eksploitasi, kebutuhan kesehatan dan psikologis, serta risiko keamanan memberikan dasar bagi aktor nasional dalam menentukan bentuk perlindungan yang sesuai. Dengan demikian, fungsi informasional menunjukkan karakter IOM sebagai organisasi internasional karena IOM mampu mengumpulkan dan menyediakan pengetahuan lintas wilayah yang kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan memperkuat perlindungan korban berbasis bukti.

Sementara itu, fungsi forum memperkuat kemampuan IOM dalam mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat dalam perlindungan korban. Karakter perdagangan orang yang lintas batas menyebabkan identifikasi, perlindungan, dan pemulangan korban membutuhkan keterlibatan berbagai institusi. Dalam konteks NRM, IOM membantu menghubungkan pemerintah,

aparatus penegak hukum, lembaga sosial, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, serta aktor internasional sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, IOM tidak sekadar menjadi pelaksana program, tetapi menjalankan fungsi *convener* yang memungkinkan koordinasi antarpemangku kepentingan berlangsung secara lebih terstruktur.

Selain ketiga fungsi tersebut, fungsi normatif, pembuatan aturan, pengawasan aturan, dan generasi ide tetap memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan korban, tetapi pengaruhnya lebih bersifat pendukung dan tidak sekuat fungsi operasional dalam menghasilkan tindakan langsung. Fungsi normatif terlihat melalui promosi *victim-centred approach*, *rights-based approach*, dan *non-punishment principle*. Fungsi pembuatan aturan terlihat melalui dukungan terhadap penyusunan pedoman NRM yang menjadi standar operasional perlindungan korban. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemantauan implementasi dan pemberian rekomendasi, sedangkan fungsi generasi ide terlihat melalui pengembangan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan modus perdagangan orang, termasuk lokalisasi NRM dan pengembangan kebijakan baru.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa IOM menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional bukan karena memiliki kewenangan untuk memaksa Thailand, melainkan karena mampu menyediakan sumber daya, keahlian, informasi, jaringan kerja sama, serta standar internasional yang membantu negara memperkuat kapasitas perlindungan korban. Fungsi tersebut bersifat fasilitatif, teknis, dan normatif, bukan koersif. Dalam perspektif organisasi internasional, kondisi ini menunjukkan bahwa IOM dapat memengaruhi tata

kelola domestik melalui kerja sama dan institusionalisasi norma tanpa menggantikan kewenangan negara. Hal tersebut sejalan dengan paradigma neoliberal institusionalis yang digunakan dalam penelitian, yaitu bahwa institusi internasional dapat membantu negara bekerja sama dalam menghadapi persoalan transnasional yang sulit diselesaikan secara unilateral.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa fungsi IOM memiliki keterbatasan struktural. IOM tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah Thailand mengubah kebijakan, memberikan sanksi, ataupun mengambil alih kewenangan negara dalam penegakan hukum. Fungsi pengawasan IOM, misalnya, dilaksanakan melalui monitoring, evaluasi, asistensi teknis, dan rekomendasi, bukan melalui mekanisme penegakan yang memiliki daya paksa. Efektivitas dukungan IOM karena itu sangat bergantung pada kemauan pemerintah Thailand, kapasitas institusi nasional terutama di tingkat lokal, ketersediaan sumber daya, serta keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, IOM dapat dipahami sebagai aktor pendukung dalam tata kelola perdagangan orang yang memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan fungsi dan kewenangan negara Thailand.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi *International Organization for Migration* (IOM) dalam perlindungan korban perdagangan orang di Thailand tahun 2023–2025, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi IOM, penguatan dukungan terhadap *National Referral Mechanism* perlu diarahkan secara lebih intensif pada tingkat lokal, khususnya provinsi yang berada di wilayah perbatasan dan memiliki tingkat kerentanan perdagangan

orang yang tinggi. IOM dapat memprioritaskan pendampingan teknis, pelatihan berkala, serta evaluasi implementasi NRM agar standar identifikasi dan perlindungan korban tidak hanya tersedia dalam pedoman, tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh aparat di tingkat daerah. Hal ini penting karena penelitian menemukan adanya perbedaan kapasitas antarlembaga dan antarwilayah dalam menerapkan standar perlindungan korban.

Kedua, bagi Pemerintah Thailand, keberlanjutan perlindungan korban perlu diperkuat melalui pelembagaan standar NRM ke dalam kapasitas dan anggaran nasional. Ketergantungan terhadap dukungan teknis maupun pendanaan eksternal dapat mengurangi keberlanjutan program apabila terjadi perubahan prioritas donor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya sumber daya manusia, anggaran, dan mekanisme koordinasi yang memadai pada tingkat nasional maupun daerah sehingga dukungan IOM dapat berkembang menjadi kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Ketiga, koordinasi lintas negara perlu diperkuat, terutama dalam kasus yang melibatkan korban asing dan jaringan perdagangan orang yang beroperasi di wilayah perbatasan. Pemerintah Thailand bersama IOM dapat memperkuat mekanisme pertukaran informasi, koordinasi identifikasi korban, serta prosedur *safe repatriation* dengan negara asal korban. Penguatan tersebut penting karena proses perlindungan tidak berhenti ketika korban berhasil diidentifikasi di Thailand, tetapi juga mencakup pemulangan dan reintegrasi di negara asal.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat mengembangkan kajian dengan mengukur efektivitas program IOM secara lebih mendalam, terutama mengenai perubahan kondisi korban setelah menerima layanan

perlindungan, keberhasilan reintegrasi, serta perbedaan implementasi NRM antarprovinsi. Hal ini dapat melengkapi penelitian ini yang berfokus pada analisis fungsi dan fungsi IOM berdasarkan data sekunder serta belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap hasil jangka panjang intervensi.

